



Menegosiasikan Agama dan Negara: Moderasi Islam dalam Pemikiran dan Peran Muhammadiyah

Prista Kelana Saeful Rohman

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: pristakelana@gmail.com

Abstract: *This article focuses on examining the relationship between religion and state thought according to Muhammadiyah in strengthening Islamic moderation. The purpose of this study is to analyze the extent to which religion and state can connect with each other. This study reveals that religion has a broad impact on the state and Muhammadiyah positions itself neither on the principles of secularism nor theocracy. The research method in this article is a qualitative literature study with a normative-theological approach, namely by examining Islamic literary sources such as the Qur'an, hadith, and the works of Islamic figures, especially in the context of Muhammadiyah. The data used are sourced from primary and secondary literature, such as official organizational documents, Muhammadiyah congresses, books, scientific articles, and the results of relevant academic studies related to the relationship between religion and state thought according to Muhammadiyah in strengthening Islamic moderation. The research findings show how the connectivity of Muhammadiyah's views builds, views, and contributes to the state through the fields of education, health, and social affairs to realize a civilized, inclusive national life based on the values of Islamic moderation. Unlike previous studies that positioned Muhammadiyah's Islamic moderation as a normative doctrine, this article demonstrates that Muhammadiyah's perspective of Islamic moderation is concretely articulated in the fields of education, health, and social welfare. Thus, Muhammadiyah views the relationship between religion and state as a strategic partnership to achieve the common good, without either party dominating the other within a framework of diversity.*

Keywords: *Islamic Moderation, Muhammadiyah Thought, Role of Muhammadiyah*

Abstrak: Artikel ini fokus mengkaji relasi pemikiran antara agama dan negara menurut Muhammadiyah dalam memperkuat moderasi Islam. Tujuan penelitian ini menganalisis sejauh mana agama dan negara dapat berkoneksi satu sama lain. Penelitian ini mengungkap bahwa agama memberikan dampak yang luas untuk negara dan Muhammadiyah memposisikan diri tidak berada pada prinsip sekularisme maupun prinsip teokrasi. Metode penelitian dalam artikel ini adalah studi kepustakaan yang bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif-teologis, yaitu dengan menelaah

sumber-sumber literatur keislaman seperti Al-Qur'an, hadis, serta karya-karya pemikiran tokoh Islam, khususnya dalam konteks Muhammadiyah. Data yang digunakan bersumber dari literatur primer dan sekunder, seperti dokumen resmi organisasi, muktamar Muhammadiyah, buku, artikel ilmiah, serta hasil-hasil kajian akademik yang relevan yang memiliki keterkaitan dengan relasi pemikiran agama dan negara menurut Muhammadiyah dalam memperkuat moderasi Islam. Hasil temuan penelitian menunjukkan bagaimana konesivitas pandangan Muhammadiyah yang membangun, memandang, dan memberikan sumbangsih untuk negara melalui bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial guna mewujudkan kehidupan berbangsa yang berkeadaban, inklusif, dan berlandaskan nilai-nilai moderasi Islam. Berbeda dari kajian-kajian sebelumnya yang menempatkan moderasi Islam perspektif Muhammadiyah sebagai doktrin normatif, artikel ini menunjukkan bahwa moderasi Islam perspektif Muhammadiyah diartikulasikan secara nyata dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, Muhammadiyah memandang hubungan antara agama dan negara sebagai kemitraan strategis untuk mewujudkan kemaslahatan bersama tanpa ada yang saling mendominasi dalam bingkai kebhinekaan.

Kata kunci: *Moderasi Islam, Pemikiran Muhammadiyah, Peran Muhammadiyah*

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang majemuk dan multikultural tidak menganut prinsip Sekularisme dimana kebijakan hukum publik tidak didasarkan pada prinsip keagamaan karena agama dianggap sebagai pedoman religius secara pribadi maupun prinsip Teokrasi yang mendasarkan semua keputusan negara diambil dari prinsip-prinsip agama. Indonesia tidak menganut prinsip-prinsip tersebut, namun Indonesia menganut prinsip yang didasarkan pada Pancasila, khususnya pada ketuhanan yang maha esa sesuai dengan butir pertama Pancasila. Dengan prinsip ini, tentu memberikan dampak yang signifikan untuk beragama dengan bebas dan berkeadilan. Hubungan antara agama dan negara merupakan isu utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mengingat Indonesia sendiri adalah negara yang agamis, terutama karena mayoritas penduduknya adalah Islam.

Muhammadiyah merupakan salah satu gerakan dakwah Islam yang berdiri pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H atau 18 November 1912 M di Yogayakarta oleh KH. Ahmad Dahlan. Muhammadiyah adalah sebuah pergerakan dalam Islam *amar ma'ruf nahi mungkar* dengan akidah Islam dan berpatokan pada Al Quran dan Hadist¹. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki pandangan tersendiri mengenai relasi antara agama dan negara. Pemikiran Muhammadiyah ini berakar pada keyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara². Muhammadiyah menegaskan pentingnya beragama tanpa harus mengubah negara menjadi negara teokrasi maupun sekuler. Pancasila dianggap sejalan dengan nilai-nilai Islam mencerminkan bahwa tidak adanya paksaan apapun untuk mengikuti ajaran Islam mengingat bahwa penduduk Indonesia tidak semuanya beragama Islam.

Sejak berdirinya, Muhammadiyah tidak pernah berniat untuk ikut serta dalam politik praktis maupun untuk menjadi sebuah partai politik, akan tetapi sebagai sebuah organisasi yang bergerak dalam dakwah Islam³. Meskipun demikian, Muhammadiyah memandang bahwa umat Islam harus aktif dalam politik dan pemerintahan namun peran tersebut harus dijalankan dengan semangat *amar ma'ruf nahi munkar* dan menjauhkan diri dari politik kekuasaan yang pragmatis⁴. Salah satu visi Muhammadiyah adalah berupaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil'alam (rahmat bagi seluruh alam semesta) menuju masyarakat yang moderat, teladan, inklusif, toleran, solid, dan peduli kepada sesama yang

¹ Nurhayati dkk, “Muhammadiyah dalam perspektif sejarah, Organisasi, dan Sistem Nilai”, Yogyakarta: TrushMedia Publishing, 2018), hlm.1-2

² Hamsah, “Dasar Pemikiran Islam Berkemajuan Muhammadiyah 1912-1923”, Tesis, UIN Alauddin, Makassar (2016) hlm.1 <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1753/1/Hamzah%20F.pdf> (Dasar Pemikiran Islam Berkemajuan, n.d.)

³ Zuly Qadir, “Muhammadiyah memperkuat moderasi islam memutus radikalisme”, *Journal of Ma'arif Institute*, 2009, diakses 3 Juni 2025, <https://doi.org/10.47651/mrf.v14i2.58>

⁴ Pani Dias, “Islam berkemajuan berspektif haedar nashir”, *jurnal Edupedia Publisher* vol.3 no.3 2024, diakses 3 Juni 2025 <https://doi.org/10.56855/jpr.v3i3.1072>

diridhai oleh Allah SWT.⁵ Selama satu abad sejarahnya sejak didirikan pada 1912 oleh KH.Ahmad Dahlan, Muhammadiyah telah mengalami transformasi esensial dalam pemikirannya terhadap problem sosial dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Perkembangan pemikiran yang signifikan yang sejalan dengan dinamika sosial, politik, dan keagamaan di Indonesia. Pada mulanya, Muhammadiyah hanya fokus terhadap pemurnian ajaran Islam dari praktik-praktik keagamaan yang dianggap bid'ah khurafat, dan takhayul dengan menekankan pentingnya kembali pada ajaran Al-Quran dan Sunnah dan akal sehat dalam memahami agama⁶.

Seiring berkembangnya zaman, khususnya pasca kemerdekaan Indonesia, Muhammadiyah mulai memperluas pemikirannya dari yang awalnya hanya pemurnian ajaran Islam, menuju gerakan sosial yang lebih pluralis dan progresif. Gerakan Muhammadiyah tidak hanya diarahkan pada aspek teologis tetapi juga pada pemikiran sosial seperti keadilan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan umat⁷. Pada tahun 1970-1980-an organisasi Islam ini semakin terbuka terhadap wacana keislamannya yang berorientasi pada perubahan sosial dan pembangunan bangsa dengan mengembangkan konsep “Islam Berkemajuan” sebagai landasan ideologis⁸. Dalam sektor sosial, Muhammadiyah aktif dalam memerangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperjuangkan nilai-nilai keadilan sosial. Bukti dari gerakan ini adalah pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terbukti efektif melalui program-program seperti zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS)⁹. Lalu dalam sektor Pendidikan, Muhammadiyah sangat aktif dalam mengembangkan ilmu

⁵ (LPH-KHT PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH, VISI MISI MUHAMMADIYAH, 2014) diakses 3 Juni 2025 <https://www.lphkhtmuhammadiyah.or.id/visi-misi-tujuan-muhammadiyah/>

⁶ Aisyah Khoirunni'mah Al Mufarriju, “Sejarah dan peran Muhammadiyah untuk kemajuan Indonesia”, *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, vo.2, 2024, hlm. 125 <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i4.442>

⁷ Syamsul arifin, “Rekonstruksi Al Islam Kemuhammadiyahan (AIK) perguruan tinggi Muhammadiyah sebagai praksis pendidikan nilai”, *Jurnal UMM*, vol.13, 2015, <https://doi.org/10.32729/edukasi.v13i2.239>

⁸ Ahmad syafii, “membumikan Islam”, IRCiSod, Yogyakarta, 2019, hlm.114

⁹ Aisyah, OpCit, hlm.125 (Aisyah Khoirunni'mah Al Mufarriju, 2024)

pengentahuan dengan membangun sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar hingga Universitas. Bisa kita lihat bahwa sekolah maupun universitas Muhammadiyah terakreditasi unggul/baik dalam semua tingkatan. Ini menunjukkan keseriusan Muhammadiyah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat *Preamble* aline ke 4. Di Yogyakarta saja, ada 2 Universitas basis Muhammadiyah yang menjadi kampus swasta terfavorit, diantarnya yaitu Universitas Ahmad Dahlan dengan akreditasi unggul berdasarkan nomor 393/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/V/2023¹⁰ dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan akreditasi Unggul berdasarkan BAN-PT No. 2002/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2022¹¹

Salah satu tokoh Muhammadiyah yang terkenal dalam pemikiran-pemikiran berkemajuan nya adalah Prof. Dr. Haedar Nashir, beliau adalah seorang cendekiawan muslim yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Pusat Muhammadiyah yang terpilih untuk kedua kalinya dalam Muktamar ke 48 di Surakarta untuk periode 2022-2027¹². Beliau konsisten mengusung gagasan Islam berkemajuan sebagai fondasi bagi kemajuan bangsa. Menurutnya, Islam bukan sekadar sistem keyakinan ritualistik, melainkan sistem nilai yang dapat memberi kontribusi besar dalam membangun peradaban modern, berkeadilan, dan humanistik. Dalam konteks ini, umat Islam di Indonesia harus tampil sebagai pelaku transformasi sosial, bukan hanya sebagai kelompok moral yang pasif. Haedar menolak pemahaman yang sempit terhadap pandangan agama yang hanya berorientasi pada formalisme Syariah. Menurutnya, pemahaman agama harus mengedepankan substansi nilai-nilai islam seperti kemanusiaan, keadilan, ilmu pengetahuan dan kesetaraan sebagai pondasi dalam pembangunan bangsa, hal ini sejalan dengan Muhammadiyah sebagai gerakan *tajdid*

¹⁰ Tim Pusat Akreditasi Universitas Ahmad Dahlan, 2023, diakses 3 Juni 2025 <https://uad.ac.id/akreditasi-universitas/>

¹¹ Tim Pusat Akreditasi, UMY, 2022 diakses 3 Juni 2025 <https://vokasi.umy.ac.id/wp-content/uploads/2023/06/Sertifikat-Akreditasi-UMY-2022-2027.pdf>

¹² Goins Manoppo, Dua periode pimpin PP Muhammadiyah, 2022. diakses 4 Juni 2025 <https://sulut.kemenag.go.id/berita/508844/Dua-Periode-Pimpin-PP-Muhammadiyah-Haedar-Nashir-di-Mata-Kakanwil-Sarbin-Sche?>

(pembaruan) yang terus mendorong kemajuan bangsa.¹³ Haedar juga menekankan bahwa posisi Pancasila sebagai jalan tengah antara relasi agama dan negara. Dimana ia menyebut Indonesia sebagai “*Darul al-Ahdi wa al-Shahadah*”, yang berarti negara yang lahir dari konsensus bersama dan menjadi tempat bagi umat islam memberikan kontribusi sosialnya¹⁴. Negara juga tidak boleh mengintervensi keyakinan agama seseorang, namun agama juga tidak boleh dijadikan alat politik kekuasaan. Pentingnya moderasi dalam beragama (*Wasathiyah*) sebagai fondasi kehidupan berbangsa. Ia mengingatkan bahwa ekstrimisme radikal maupun liberal dapat mengganggu harmoni sosial dan mengancam keutuhan bangsa.¹⁵ Pandangan kebangsaan Muhammadiyah ini sejalan dengan cita-cita Islam tentang negara idaman yaitu *Baldatun Thayibatun Wa Rabbun Ghafur*, yaitu negeri yang baik dan berada dalam ampunan Allah SWT¹⁶. Menurut sekretaris umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, islam *wasathiyah* diambil dari kata *wasatha* dalam Al-Qur'an yang disebut lima kali dengan segala derivasinya, yaitu 1) *wasatna* (QS. Al-Adiyat: 5), yakni tengah atau terbaik; 2) *wasathan* (QS. Al-Baqarah: 143), artinya adil dan pilihan; 3) *awsith* (QS. Al-Qalam: 28), maknanya bijaksana; dan 5) *wustha* (QS. Al-Baqarah: 238), ini berkaitan dengan waktu shalat¹⁷

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini akan fokus menguraikan bagaimana pandangan-pandangan Muhammadiyah melihat relasi antara agama dan negara dalam memperkuat moderasi Islam dari waktu ke waktu untuk kemajuan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Maka dari itu, adapun pertanyaan yang dikaji oleh penulis antara lain: 1)

¹³ Suara Muhammadiyah, 101 Tahun suara Muhammadiyah, 2016, diakses 4 Juni 2025 <https://web.suaramuhammadiyah.id/2016/10/26/101-tahun-suara-muhammadiyah-harapan-baru-islam-berkemajuan/>

¹⁴ Haedar Nashir, “Darul al-Ahdi wa al-Syahadah: Konsepsi Negara dalam Perspektif Islam Indonesia,” dalam Tafsir Sosial atas Islam, diakses 5 Juni 2025 <https://muhammadiyah.or.id/2023/08/darul-ahdi-wa-al-syahadah-negara-pancasila-perspektif-islam-berkemajuan/>

¹⁵ Ibid, hlm.2

¹⁶ Kusumawati, Perspektif Muhammadiyah Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah, *Journal Sangaji* Vol.3 No.2, 2019, diakses 20 Juli 2025 <https://doi.org/10.52266/sangaji.v3i2.472>

¹⁷ Ilham, “Moderasi beragama dalam perspektif Muhammadiyah”, 2021, diakses 20 Juli 2025, <https://muhammadiyah.or.id/2021/11/moderasi-beragama-dalam-perspektif-muhammadiyah/>

Bagaimana perkembangan pemikiran Muhammadiyah tentang hubungan antara agama dan negara dalam memperkuat moderasi Islam? 2) Apa peran strategis Muhammadiyah dalam membangun moderasi Islam?

Sejumlah penelitian terdahulu mengenai hubungan antara agama maupun Muhammadiyah dengan negara dalam memperkuat moderasi Islam, baik dituangkan dalam bentuk artikel jurnal maupun karya ilmiah lain. Diantaranya adalah Muhammadiyah memperkuat moderasi Islam memutus radikalisme¹⁸, Moderasi beragama dan Hak Asasi Manusia (HAM): Analisis Peran Agama dalam memperkuat Toleransi dan Kesetaraan¹⁹ dan penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat normatif-teologis. Pendekatan ini dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai sumber literatur keislaman seperti Al-Qur'an, hadis, serta pemikiran tokoh-tokoh Islam, khususnya yang berasal dari lingkungan Muhammadiyah. Tujuan pendekatan ini adalah untuk menggali secara mendalam dan sistematis konsep-konsep keislaman, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai moderasi Islam sebagaimana diaktualisasikan dalam gerakan dan pemikiran Muhammadiyah. Data dalam penelitian ini diperoleh dari literatur primer dan sekunder, termasuk dokumen-dokumen resmi organisasi, hasil keputusan Muktamar Muhammadiyah, buku-buku, artikel ilmiah, serta kajian akademik lainnya yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan hubungan antara pemikiran keagamaan dan kenegaraan dalam perspektif Muhammadiyah dalam upaya memperkuat moderasi Islam.

Berdasarkan keresahan pada rumusan masalah maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini diantaranya: 1) Untuk menggali, memahami, dan menjelaskan pandangan Muhammadiyah dalam menyikapi isu-isu keagamaan dan kenegaraan seiring dengan dinamika sosial dan politik di Indonesia. 2) Untuk menggambarkan peran serta menganalisis kontribusi Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa

¹⁸ Zuly Qadir, "Muhammadiyah memperkuat moderasi islam memutus radikalisme", *journal Maarif Institute*, 2009, diakses 20 Juli 2025, <https://doi.org/10.47651/mrf.v14i2.58>

¹⁹ Hidayat E, "Moderasi beragama dan Hak Asasi Manusia (HAM): Analisis Peran Agama dalam memperkuat Toleransi dan Kesetaraan", *Journal In Right*, 2024, diakses 20 Juli 2025 <https://doi.org/10.14421/wkdjc729>

dan bernegara, khususnya dalam konteks menjaga kerukunan antar umat beragama dan memberikan sumbangsih untuk bangsa.

Dengan demikian, signifikansi penelitian ini sangat penting baik dari teoritis memberikan sumbangan ilmiah dalam konteks pemikiran Islam modern di Indonesia, maupun praktis yang memberikan gambaran kontribusi Muhammadiyah dalam membangun demokrasi yang inklusif dan berkeadaban.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Pemikiran Muhammadiyah tentang Hubungan antara Agama dan Negara dalam Memperkuat Moderasi Islam

Relasi antara agama dan negara menjadi topik yang sering dibahas dalam kancanah pemikiran politik Islam, Muhammadiyah sebagai organisasi Islam modernis memiliki posisi yang konsisten dalam menjembatani antara nilai-nilai agama dengan nilai-nilai kenegaraan. Maka dari itu, Muhammadiyah tidak menganjurkan untuk membentuk negara agama (teokrasi), tetapi juga tidak mendukung prinsip sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan bernegara secara mutlak. Sebaliknya, Muhammadiyah mengusung pandangan “Negara Pancasila yang berjiwa Islami dan Inklusif” yang mampu mengakomodasi aspirasi umat Islam tanpa menyampingkan umat lain yang ada di Indonesia²⁰.

Muhammadiyah yang didirikan oleh KH.Ahmad Dahlan pada 8 Zulhijjah 1330 H, atau pada tanggal 18 November 1912 M di Yogyakarta, bertujuan untuk mengembalikan kehidupan keislaman yang telah hilang dalam bidang politik, ekonomi, perdagangan, Pendidikan, kebudayaan, dan bidang keagamaan. Tidak hanya itu, Muhammadiyah ingin memurnikan kembali ajaran Islam yang telah tercampur dengan berbagai paham sehingga muncullah takhayul, khurafat, bid'ah, dan syirik dikalangan masyarakat muslim. Berdasarkan hal tersebut, Muhammadiyah ingin mempertahankan regenerasi Islam di masa saat itu dan masa yang akan datang karena derasnya arus kristenisasi di Indonesia dan mengembalikan citra Islam di kalangan pemuda dan remaja karena derasnya informasi dan kebudayaan yang

²⁰ Opcit, Haedar Nashir, hlm.3

masuk akan mempengaruhi kepribadian umat muslim²¹. Dasar dalam pembentukannya, Muhammadiyah merefleksikan diri kepada Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104:

وَلَئِنْ كُنْ مِنْكُمْ أَمَةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung”.

Dengan demikian, awal mula lahirnya Muhammadiyah dapat disimpulkan bahwa untuk membersihkan kebiasaan-kebiasaan umat Islam di Indonesia yang tidak Islami, reformulasi doktrin keagamaan yang mengikuti perkembangan modern termasuk dalam sektor pendidikan dan mempertahankan Islam dari paradigma budaya luar. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah (MKCH Muhammadiyah) rumusan prinsip dasar ideologis Muhammadiyah yang berfungsi sebagai pedoman hidup warga Muhammadiyah dalam mewujudkan tujuan organisasi, terutama dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan kemasyarakatan. MKCH dirumuskan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-37 di Yogyakarta tahun 1968 dan menjadi dokumen penting bagi gerakan Muhammadiyah²². Rumusan matan dan cita-cita hidup Muhammadiyah terdiri dari 5 (lima) angka, dan dikelompokkan kedalam 3 (tiga) kelompok.

Kelompok pertama mengandung pokok persoalan yang sifatnya ideologis, ini tertuang dalam pasal 4 ayat ayat (1) AD dan ART Muhammadiyah yang berbunyi “Muhammadiyah adalah gerakan Islam, Da’wah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Tajdid bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah²³. Dan di dalam ayat (2) nya mengatakan bahwa

²¹ St Nurhayati dkk, “Muhammadiyah: Konsep wajah islam Indonesia”, Suara Muhammadiyah, Pare-pare, 2019, hlm.33.

²² Eliza F dkk, “Sejarah perumusan dan teks matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah” *Jurnal Umsu* Vol.5 No.1 diakses 11 Juni 2025 <https://doi.org/10.3059/insis.v0i1.18741>

²³ Pasal 4 ayat (1) AD ART Muhammadiyah, 2023. diakses 11 Juni 2025 <https://ww5.w.jembermu.com/p/anggaran-dasar-dan-anggaran-rumah.html>

Muhammadiyah berasaskan Islam. Dengan begitu kita memahami bahwa identitas Muhammadiyah sebagai suatu organisasi adalah organisasi Islam. Kelompok kedua mengandung persoalan yang membahas mengenai paham agama dan ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang aqiqah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Menurut Muhammadiyah, yaitu Muhammadiyah mengamalkan Islam berdasarkan Al-Qur'an dan as-sunnah. Sehingga ijma maupun qiyas bukanlah sebagai sumber, melainkan hanya sebagai ijтиhad²⁴. Kelompok ketiga mengandung persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam bernegara, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa, dan negara Republik Indonesia berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu bangsa dan negara yang adil, makmur, dengan diridhai Allah SWT²⁵.

Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan dalam menjalankan aktivitasnya lebih menekankan pada gerakan dakwah amr ma'ruf nahyi munkar. Dakwah nya adalah yang terdapat dalam Al-Qur'an itu sendiri yaitu *ad da'wah ila daris salam, ad da'wah ilallah, ad da'wah ilal Jannah, ad da'wah ilal khair* dan sebagainya. Dakwah ini bersifat multidimensional artinya Muhammadiyah mesti akan berubah secara dinamis mengikuti perkembangan zaman²⁶. Pada awal pembentukannya, Muhammadiyah memiliki tantangan untuk memurnikan ajaran agama Islam sebagaimana mestinya, karena saat itu masyarakat Islam sangat mempercayai hal-hal yang bersifat takhayul, bid'ah, dan khurafat. Namun gerakan masif Muhammadiyah dilakukan 4 tahun setelahnya yaitu tahun 1916 dengan mendirikan beberapa sekolah. Saat itu, pelaksanaan Pendidikan hanya terdiri dari dua sistem, yaitu pendidikan pesantren dan pendidikan barat. Pendidikan pesantren yang dikelola secara tradisional mengajarkan studi keislaman tradisional seperti ilmu kala, ilmu fikih, tasawuf Bahasa arab dan versinya, ilmu hadist, ilmu tafsir, dan lain sebagainya²⁷. Dalam proses belajar saat itu,

²⁴ Eliza F, Opcit, hlm.69

²⁵ Eliza F, Opcit, hlm.70

²⁶ Cecep suryana, "Kiprah politik dan sejarah organisasi Muhammadiyah Indonesia", *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol.4 No.14 , diakses 5 Juni 2025 <https://doi.org/10.15575/idalhs.v4i14.414>

²⁷ Opcit, St Nurhayati dkk, hlm.69

guru dianggap sebagai sumber kebenaran yang tidak boleh dikritisi, sehingga proses belajar menjadi tidak demokratis dan akan menimbulkan sifat taklid yang berlebihan. Fasilitas modern yang dapat digunakan justru dilarang karena dianggap menyamai hal-hal yang biasa dilakukan orang kafir, dan jika melakukannya maka ia juga termasuk golongan kafir. Hal inilah yang membuat Muhammadiyah ingin mereformasi cara berfikir yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu, pendidikan barat yang dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda di Jawa hanya mengajarkan ilmu-ilmu dan metode pengajaran yang didasarkan pengetahuan di dunia barat yang disebut dengan Pendidikan umum. Dengan demikian, hal-hal ini melahirkan dua poros pembeda antara yang agamis dengan yang sekuler.

Pada tahun 1905 pemerintah Hindia-Belanda mengeluarkan peraturan yang isinya menjelaskan bahwa orang yang memberikan pengajaran pengajian harus minta izin terlebih dahulu. Alasannya adalah pemerintah Hindia-Belanda khawatir akan perkembangan organisasi ini, itulah yang menjadi penyebab setiap kegiatan organisasi ini dibatasi. Lalu, pada 1925 lahirlah peraturan yang lebih ketat lagi yang isinya adalah tidak semua kyai dapat mengajar, pada waktu itu sekolah Muhammadiyah sudah mulai tumbuh dan sekolah-sekolah lain pun sudah mulai berkembang. Sebelum Muhammadiyah tersebar luas ke penjuru negeri, Ahmad Dahlan telah melakukan berbagai upaya legalisasi organisasi yang didirikannya untuk memperoleh badan hukum dengan mendaftarkannya pada pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 20 Desember 1912. Dan baru dikabulkan pada tahun 1914 dengan Surat Ketetapan Pemerintah No.81 tanggal 22 Agustus 1914, namun izin ini hanya berlaku dan boleh bergerak di daerah Yogyakarta saja²⁸.

Meskipun Muhammadiyah dibatasi hanya di wilayah Yogyakarta saja, Ahmad Dahlan menyiasati dengan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah diluar Yogyakarta memakai nama lain, seperti Nurul-Islam di Pekalongan, AL-Munir di Makassar, Ahmadiyyah di Garut, bahkan di Solo berdiri perkumpulan Sidiq, Amanah, Tabligh, Fathonah (SATF) yang dapat bimbingan langsung dari Muhammadiyah²⁹. Ketika kepemimpinan dibawah Ahmad Dahlan, pemahaman agama

²⁸ Nurhayati dkk, “Muhammadiyah dalam perspektif sejarah, Organisasi, dan Sistem Nilai”, Yogyakarta: TrushMedia Publishing, 2018), hlm.10

²⁹ Nurhayati dkk, Ibid, hlm,11

Muhammadiyah diarahkan kepada amal perbuatan. Pemikiran keagamaan Muhammadiyah pada awalnya belum banyak berbicara mengenai fiqh dan ushul fiqh juga belum berbicara tentang ilmu takhrij al-hadis. Muhammadiyah baru memulai bergeser pada persoalan *takhrij al-Hadis* dan persoalan-persoalan ubudiyah, pada tahun 1927 (zaman kepemimpinan Kyai Ibrahim), ketika seorang tamu dari India memprotes ubudiyah Muhammadiyah yang melaksanakan Shalat Idul Fitri di dalam masjid Keraton Yogyakarta, menurut tamu itu seharusnya Muhammadiyah yang telah memposisikan diri sebagai gerakan *tajdid* melaksanakan shalat Idul Fitri maupun Idul Adha di tanah lapang sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW³⁰.

Berikutnya adalah pada masa kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo (1942-1953) pemikiran keagamaan Muhammadiyah lebih mengedepankan pada persoalan akidah dan akhlak. Pada periode inilah dirumuskan Muqqadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Arah pemikiran di periode ini juga banyak mengarah pada persoalan perjuangan politis³¹. Seperti perdebatan di PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang mana tugas PPKI adalah menetapkan UUD dan Mukkaddimahnya mengundang pro dan kontra dikala penghapusan 7 kata dalam piagam Jakarta dengan kewajiban menjalankan *syari'at* Islam bagi para pemeluknya. Pada akhirnya, Ki Bagus Hadikusumo merelakan jika syariat Islam tidak dimasukkan kedalam UUD karena penjelasan dari Kasman Singodimejo seorang anggota PP Muhammadiyah yang mengatakan bahwa UUD hanya bersifat sementara dan akan ditetapkan kembali setelah 12 bulan MPR terbentuk.

Selanjutnya, beberapa kepemimpinan pemikiran Muhammadiyah disebut *Fiqhi sentris*, yaitu pendekan dalam memahami ajaran Islam yang berfokus pada fiqh (hukum Islam) aspek hukum halal-haram, wajib-sunnah dan seterusnya menjadi ajaran utama dalam memahami agama. Pemikiran seperti ini berlangsung antara kepemimpinan-kepemimpinan AR.Sutan Mansur (1953-1959), H.M. Yunus Anis (1959-1962), Ahmad Badawi (1962-1968) hingga periode Azhar Bashir (1990-1995)³². Pemimpin ini memiliki latar belakang

³⁰ Nurhayati dkk, Ibid, hlm.15

³¹ Nurhayati dkk, Ibid, hlm.16

³² Nurhayati dkk, Ibid hlm.17

Pendidikan pesantren, dan juga sebagai pedagang, guru/dosen, dan swasta.

Selanjutnya adalah kepemimpinan Muhammad Amin Rais (1995-2000) dimana dalam pemikiran-pemikiran Muhammadiyah mulai tumbuh wacana Islam liberal, Islam Sekuler, Islam Plural, dan lain sebagainya. Salah satu gebrakan pemimpin di periode ini adalah mengangkat ketua Majlis Tarjih yang bukan dari basis Syariah, namun dari basis Ushuluddin, yaitu Muhammad Amin Abdullah. Tentu ini bukan kebiasaan Muhammadiyah yang biasanya mengangkat seseorang dari syari'ah. Salah satu poin yang penting adalah pemikiran yang memungkinkan menggunakan pendekatan Hermeneutika dalam memahami teks keagamaan disamping pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani. Pemikiran ini cukup revolusioner karena berani memasukkan unsur-unsur liberalisme, pluralism, dan mutikulturalisme kedalam tubuh Muhammadiyah sehingga mampu memperluas pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Dan ini terus berlangsung hingga kepemimpinan Achmad Syafii Maarif (2000-2005)³³.

Periode kepemimpinan M.Din Syamsuddin (2005-2015) yang menjabat 2 periode , Muhammadiyah mengedepankan pokok-pokok pikiran yang menjadi sikap resmi Muhammadiyah antara lain tentang komitmen Gerakan, pandangan keagamaan, kebangsaan, serta kemanusiaan yang dituangkan dalam sebuah slogan *Zawahir al-Afsar al-Muhammadiyah Abra Qarn min al-zaman* yang artinya “Perkembangan gagasan Muhammadiyah Melintasi Satu Abad Waktu.

Periode Haedar Nashir (2015-2027), haedar terpilih kembali dalam Muktamar ke 48 di Surakarta tahun 2022 dipercaya untuk memimpin Muhammadiyah hingga 2027. Seharusnya Muktamar ke 48 digelar pada tahun 2020, namun itu terhalang karena adanya pandemi covid-19. Kepemimpinan beliau dikenal dengan gaya yang tenang, akademis dan kolaboratif yang berfokus pada pemajuan pendidikan, kesehatan, ekonomi umat, dan moderasi beragama.

Moderasi agama merupakan sebuah cara pandang dan bersikap yang mengambil jalan tengah dan menolak paham ekstrimisme. Cara pandang ini meliputi menghargai perbedaan, menghormati agama lain, dan dalam konteks kenegaraan membantu menjaga keseimbangan antara keyakinan pribadi dan kepentingan hidup bersama dalam masyarakat yang multikultural. Istilah moderasi agama dipopulerkan

³³ Nurhayati dkk, Ibid hlm.21

oleh Lukman Hakim Saifudin saat menjabat sebagai Menteri Agama RI periode 2014-2019³⁴. Moderasi Islam bertujuan untuk saling menjaga kerukunan antar umat beragama, mencegah radikalisme, dan menguatkan semangat kebangsaan. Moderasi Bergama dapat dimaknai sebagai upaya dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama yang tidak terjebak pada dua sisi ekstrem, baik yang terlalu ketat atau yang terlalu longgar. Sisi yang terlalu ketat hanya akan membenarkan agamanya, termasuk tafsirnya sendiri dan menolak tafsir lain dan berpotensi akan menimbulkan sikap fanatisme dan radikalisme yang pada akhirnya membenarkan semuanya dengan nama agama. sedangkan jika terlalu longgar cenderung mendewakan akal pikiran dan mengabaikan kesucian agama demi toleransi yang tidak semestinya. Bahkan ini sejalan dengan yang dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرُ بِالظَّاهِرَاتِ وَبُؤْمَنْ بِاللَّهِ قَدْ اسْتَقْسَمَ
بِالْأَعْرُوْةِ الْوُنْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada *taghut* dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Sejatinya umat Islam sendiri tidak dapat memaksa orang lain untuk menganut kepercayaan yang dipercaya agama Islam. Inilah yang mendasari pemikiran-pemikiran Islam moderat agar selalu saling menghormati umat lainnya agar kerukunan antar lintas agama tercapai dan Muhammadiyah sejak awal berdiri tidak pernah memaksa umat lain untuk beragama Islam dan masih tetap berpegang teguh dengan mengedepankan *nash* yang *qath'i*. Moderasi Islam merupakan wujud evolusi dari pemikiran Muhammadiyah selama beberapa waktu, moderasi dalam konteks pemikiran Muhammadiyah bukanlah sikap pengorbanan Sebagian prinsip islam, namun sebagai prinsip dasar dalam beragama dan bernegara. Moderasi Islam tumbuh dari kesadaran sejarah dan realitas bahwa Indonesia dapat berdiri menjadi sebuah negara berkat berbagai agama dan budaya yang bermacam-macam

³⁴ Mohammad Kosim, Moderasi Beragama, IAIN Madura, 2023, diakses 10 Juni 2025, <https://iainmadura.ac.id/berita/2023/12/moderasi-beragama>

menjadi satu kesatuan. Muhammadiyah memahami bahwa memaksakan formalisasi agama dalam negara yang plural akan memicu ketegangan sosial dan politik. Maka dari itu, Muhammadiyah mengedepankan pemahaman Islam yang kontekstual dan toleran dengan tetap didasarkan pada teks, menyeimbangkan akidah dan kemanusiaan, hingga berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa tanpa politisasi agama.

Pembelajaran Moderasi Islam di Sekolah dan Universitas Menurut Muhammadiyah

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara yang semakin dinamis, pendidikan agama memiliki peran strategis dalam membentuk cara pandang, sikap, dan perilaku umat Islam terhadap kebersamaan dalam perbedaan. Di tengah tantangan radikalisme dan intoleransi butuh keadaan mendesak untuk menanamkan model moderasi beragama sebagai fondasi karakter keislaman yang inklusif dan berkeadaban. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam berkemajuan menempatkan moderasi Islam bukan sekedar gagasan moral, tetapi sebagai kerangka pendidikan dan pembentukan watak melalui pendidikan di sekolah-sekolah dan Universitas. Contohnya seperti menanamkan nilai Islam moderat melalui mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) di Universitas Muhammadiyah Malang. Nilai Islam moderat yang diterapkan di Universitas ini yaitu: PAI berkembang menjadi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK), PAI berkembang melalui program Pembentukan kepribadian dan Kepemimpinan (P2KK) PAI berkembang pada kegiatan Kajian Ahad Subuh (KAS). Nilai-nilai Islam moderat yang dikembangkan dalam pendidikan di Universitas ini seperti toleransi Bergama sebatas yang dibenarkan oleh syariat Islam, *tajdid* yang tidak hanya dimaknai sebagai pemurnian aspek ritual, seperti pelurusan arah kiblat, tetapi juga mencakup pembaharuan cara berfikir dan pemahaman beragama termasuk pendirian lembaga-lembaga sosial modern yang berorientasi pada kemajuan umat.³⁵

³⁵ Sodikin A, M.Anas Ma'arif, "Penerapan Nilai Islam Moderat Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi", (2019), *Jurnal Penelitian pendidikan Agama Dan Keagamaan (EDUKASI)*, <https://doi.org/10.32729/edukasi.v19i2.702>

Peran Strategis Muhammadiyah dalam Membangun Moderasi Islam

Moderasi Islam merupakan pendekatan keagamaan yang menekankan keseimbangan, toleransi, dan keadilan dalam beragama. Indonesia sebagai negara yang plural dan demokratis memerlukan suatu konsep yang menengahi perbedaan-perbedaan, yaitu moderasi Islam yang menjadi kebutuhan untuk menjaga harmonisasi antar umat beragama. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia telah memberikan peran penting dalam memperkokoh demokrasi dan stabilitas negara melalui moderasi Islam. Kontribusi Muhammadiyah dalam penguatan ini dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, seperti Pendidikan, politik, sosial-ekonomi, dan pengembangan prinsip moderasi beragama³⁶. Dalam konteks demokrasi, Muhammadiyah memberikan penguatan yang besar dalam berbagai bidang seperti penguatan demokrasi pendidikan politik melalui sekolah, universitas, maupun majlis-majlis kajian dimana umat Islam didorong untuk aktif dalam bidang politik dan pemerintahan tetapi tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam moderat. Selain itu, Muhammadiyah juga terlibat aktif dalam menyebarkan pemikirannya itu melalui platform digital, kajian rutin, seminar, dan kajian ilmiah³⁷.

Muhammadiyah juga menjalankan fungsi kritik sesuai dengan prinsip amar makruf nahi munkar demi tegaknya sistem politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban. Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota Persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai hati nurani masing-masing. Penggunaan hak pilih tersebut harus dilaksanakan secara rasional dan kritis, sejalan dengan misi dan kepentingan Muhammadiyah, demi kemaslahatan bangsa dan negara³⁸. Toleransi demokrasi dalam pandangan Muhammadiyah mengacu pada upaya untuk mendorong nilai-nilai keseimbangan dan iklusivitas dalam

³⁶ Sugeng Aji Prasetyo dkk, “Kontribusi Muhammadiyah dalam penguatan demokrasi dan stabilitas Pemerintahan di Indonesia”, *jurnal Masterpiece*, vol.2, No.4, 2024, diakses 5 Juni 2025 <https://doi.org/10.62083/zhy67s73>

³⁷ Sugeng Aji Prasetyo dkk, Ibid hlm. 177

³⁸Tanhowi P, “Muhammadiyah dan Politik: Landasan Ideologi Bagi Artikulasi Konstruktif”, *Jurnal Maarif*, 2019, hlm.178. diakses 5 Juni 2025 <https://doi.org/10.47651/mrf.v14i2.65>

kehidupan bernegara. Sebagai organisasi Islam terbesar, Muhammadiyah selalu menekankan untuk menghindari prinsip pemahaman ekstrimisme dalam memahami agama Islam. Sebagai negara yang majemuk, Muhammadiyah mendorong umat Islam untuk menghormati dan menghargai perbedaan dengan umat lain. Tidak boleh pula memandang rendah suatu umat dan etnis maupun pandangan politik yang berbeda. Muhammadiyah juga mengajak untuk memilih pemimpin yang mempunyai kapasitas dan intergritas dan bukan berdasarkan pada politik identitas. Selain itu, Muhammadiyah juga berperan aktif dalam memperjuangkan kebijakan yang adil dan berpihak kepada rakyat kecil melalui penguatan sistem hukum yang transparan, adil, memberikan manfaat, dan memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, Muhammadiyah juga sering mengedukasi umat Islam untuk menjauhi prinsip radikalisme dengan mengatasnamakan agama.

Muhammadiyah juga memberikan sumbangsihnya untuk bangsa di bidang penyedia layanan sosial, seperti layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan panti asuhan dan lain sebagainya. Layanan kesehatan yang dimaksud adalah melalui 126³⁹ rumah sakit dan 260⁴⁰ klinik Muhammadiyah yang tersebar ke seluruh negeri. Berbagai layanan fasilitas kesehatan yang disediakan Muhammadiyah tentu diharapkan agar bisa digunakan oleh semua lapisan masyarakat tanpa memandang agama maupun suku. Layanan Pendidikan Muhammadiyah turut berperan besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, akses Pendidikan yang disediakan Muhammadiyah untuk masyarakat Indonesia mulai dari sekolah dasar hingga Universitas. Pendidikan yang diberikan tidak hanya Pendidikan yang berbasis pada ilmu pesantren, tetapi disesuaikan dengan zaman yang membutuhkan ilmu pengetahuan umum lainnya. Lalu, layanan panti asuhan dibawah Muhammadiyah berperan penting dalam mejaga stabilitas negara melalui perlindungan dan perhatian kepada anak-anak yang membutuhkan. Layanan ini tidak hanya memberikan tempat tinggal yang nyaman dan makanan yang bergizi saja, tetapi juga memberikan

³⁹ Wikipedia, Daftar Rumah Sakit Muhammadiyah, 2023 diakses 5 Juni 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_rumah_sakit_Muhammadiyah

⁴⁰ IgramRepublika, “di Usia 111, Muhammadiyah miliki 126 RS”, 2023, diakses 5 Juni 2025. <https://ihram.republika.co.id/berita/s4b0oy430/di-usia-111-tahun-muhammadiyah-miliki-126-rumah-sakit>

Pendidikan, pembinaan karakter, dan keterampilan lain yang dibutuhkan guna menghadapi tantangan global. Dengan demikian, Muhammadiyah menyumbangkan anak-anak muda yang produktif, kreatif dan berakhlak guna membangun negeri yang berkemajuan.

Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah memandang bahwa pendidikan merupakan salah satu cara yang utama untuk menyebarkan moderasi Islam. Di sekolah-sekolah Muhammadiyah tidak hanya berfokus pada sisi akademis, namun menanamkan pendidikan karakter yang inklusif dan toleran. Mata pelajaran agama Islam menekankan pada toleransi dan menghargai perbedaan keyakinan orang lain. Kurikulum tambahan yang diajarkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah selain kurikulum formal, dirancang untuk memahami dan mengembangkan pemahaman Islam yang kontekstual dan tidak kaku terhadap perubahan zaman, sehingga dapat melahirkan karakter yang toleran dan menghormati kebudayaan agama lain. Guru pengajar di sekolah Muhammadiyah dilatih untuk mengajarkan materi dengan pendekatan yang inklusif dan mendorong pemikiran yang kritis.⁴¹ Ekstrakurikuler di sekolah Muhammadiyah juga mempromosikan moderasi Islam dalam kegiatan seperti diskusi kelompok, debat, dan kunjungan ke tempat-tempat ibadah agama lain untuk menambah wawasan kebangsaan dan mengembangkan sikap toleran. Program seperti ini memberikan kesempatan kepada siswa-siswi agar dapat berinteraksi dengan latar belakang individu yang berbeda. Lalu, Muhammadiyah kini memiliki 172 Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (PTMA) 85 berbentuk universitas, 9 perguruan tinggi aisyiyah, sisanya berbentuk sekolah tinggi dan institut.⁴² Selain itu, dalam mengembangkan pendidikan ke penjuru negeri Muhammadiyah juga telah mengelola 20.233 satuan pendidikan pra-sekolah, 1381 MI (Madrasah Ibtidaiyah), 246 SMP (Sekolah Menengah Pertama), 578 MTs (Madrasah Tsanawiyah), 535 SMA (Sekolah Menengah Atas), 218 MA (Madrasah Aliyah), 616 SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), 50 SLB (Sekolah Luar Biasa), 440 pesantren, 324 Madrasah Diniyah Takmiliyah, 1.031 TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an), dan 109 PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). Sehingga dapat dikatakan

⁴¹ Warsito dkk, "Peran Muhammadiyah dalam moderasi beragama di Indonesia: sebagai pelopor dan penjaga kerukunan bergama", *Journal Masterpiece* vol.2, 2024, diakses 20 Juli 2025 <https://doi.org/10.62083/0apwf271>

⁴² Muhibib A, Keunggulan sistem pendidikan Muhammadiyah, 2024, diakses 21 Juli 2025 <https://uinjkt.ac.id/id/keunggulan-sistem-pendidikan-muhammadiyah>

bahwa kontribusi Muhammadiyah di bidang pendidikan memberikan sumbangsih yang besar untuk bangsa ini. Bahkan dipelosok negeri ini, seperti di Papua dan NTT, mayoritas agama yang dianut oleh mahasiswa nya sebesar 65%-80% adalah non-Muslim⁴³, dengan data demikian pendidikan Muhammadiyah memberikan fakta bahwa siapapun dari agama manapun dapat menimba ilmu di Muhammadiyah, bukan hanya Islam saja. Fakta Ini sejalan dengan amanat Pancasila untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam bidang kesehatan, Muhammadiyah mengoperasikan berbagai layanan kesehatan di rumah sakit maupun kliniknya dengan pendekatan yang inklusif dan tidak memandang agama manapun untuk berobat disana. Pendirian rumah sakit bermula dari gagasan kyai Mohammad Syoedjak pada tahun 1923. Tercatat dalam sejarah bahwa pelayanan kesehatan Muhammadiyah telah lebih dulu hadir dibanding dengan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, pada tanggal 13 Januari 1923 Muhammadiyah mendirikan rumah pelayanan bagi orang miskin dan terlantar yang amal usaha ini berada dibawah bidang Penolong Kesengsaraan Oemom (PKO) Muhammadiyah yang saat itu dipimpin oleh HM Soedja, salah satu murid kepercayaan KH Ahmad Dahlan⁴⁴. Sebulan kemudian, tepatnya tanggal 15 Februari 1923, pelayanan kesehatan Muhammadiyah pertama lahir di Jagang, Notoprajan, Yogyakarta dan diresmikan langsung oleh KH Ahmad Dahlan, dan ini menjadi jejak terakhir beliau karena di tanggal 23 Februari 1923, KH Ahmad Dahlan menghembuskan nafas terakhirnya. Setahun kemudian, pada tanggal 14 September lahir lagi cabang kedua layanan kesehatan Muhammadiyah di Sidodai Surabaya yang dirintis oleh dr. Soetomo⁴⁵. Spirit gerakan ini didasari ingin menolong orang yang sedang mengalami kesusahan, kesengsaraan, sebagaimana perintah Allah SWT dalam surat Al -Maun, yang kemudian populer dengan sebutan

⁴³ Muhibib, *Ibid*.

⁴⁴ Izzul Muslimin, Seratus tahun penolong kesengsaraan oemoem Muhammadiyah, 2023, diakses 21 Juli 2025 <https://muhammadiyah.or.id/2023/02/seratus-tahun-penolong-kesengsaraan-oemoem-muhammadiyah/>

⁴⁵ Tim Redaksi, Layanan kesehatan Muhammadiyah telah lahir jauh sebelum Indonesia merdeka, Muhammadiyah, diakses 21 Juli 2025, <https://muhammadiyah.or.id/2024/06/layanan-kesehatan-dari-muhammadiyah-telah-lahir-jauh-sebelum-indonesia-merdeka/>

gerakan Al-Maun. Bahkan gerakan ini juga telah menembus batas negara dan benua melalui lembaga Laziz Muhammadiyah (Lazizmu), *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)* dan Muhammadiyah Aid. Ketika pandemi covid-19 melanda Indonesia, Muhammadiyah menjadi gerakan Islam yang paling sigap dalam memberikan layanan kesehatan yang dibutuhkan, hingga rumah sakit Muhammadiyah memberikan layanan vaksin gratis kepada masyarakat. Bahkan amanat dalam dua muktamar terakhir ialah amal usha Muhammadiyah mesti menjadi *Centre of Excellent* dalam memberikan layanan terbaik.

Layanan Panti asuhan yang dinaungi oleh Muhammadiyah berdiri sebagai wujud usaha untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anak yatim, piatu, maupun yatim piatu bahkan anak dari keluarga miskin yang orang tuanya tidak mampu menyekolahkan maupun memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya. Muhammadiyah membangun panti asuhan karena didasari oleh perintah agama, yaitu dalam surah Al-Ma'un ayat 1-3 yang artinya bahwa: "tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin". Sehingga, Muhammadiyah merasa bahwa sudah menjadi kewajiban untuk melakukan itu. Pada tahun 1921 panti asuhan Muhammadiyah resmi lahir di Yogyakarta, pada awalnya panti asuhan ini masih mengasuh putra putri secara bersamaan, namun dari tahun 1928 hingga saat ini dipisahkan menjadi dua tempat, yaitu panti asuhan yatim putra Muhammadiyah, dan panti asuhan yatim putri Aisyiyah Yogyakarta⁴⁶. Dengan adanya amal usaha Muhammadiyah ini turut membantu negara dalam memelihara fakir miskin dan anak terlantar sesuai dengan amanat pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Lalu, anak-anak dalam panti asuhan Muhammadiyah juga diberikan hak-hak nya secara penuh seperti pemenuhan hak pendidikan, hak untuk beribadah, hak kasih sayang orang tua, dan hak-hak lainnya. Untuk pendidikan, Muhammadiyah mewajibkan anak-anak asuhnya mengenyam pendidikan minimal hingga SMA/SMK dan semua biaya sekolah ditanggung oleh panti asuhan yang diperoleh dari berbagai donator. Tidak hanya pendidikan formal, anak-anak panti juga diberikan pendidikan non-formal yaitu pendidikan agama seperti aqidah, akhlak,

⁴⁶ Prihati dkk, Peran panti asuhan Muhammadiyah dalam pemenuhan hak-hak anak dalam rangka perlindungan anak di DIY, *Jurnal Transparansi Hukum*, diakses 21 Juli 2025, <https://doi.org/10.30737/transparansi.v0i0.3670>

tajwid, tahnih, hingga Bahasa Arab⁴⁷. Dalam hal beribadah, panti asuhan Muhammadiyah memberikan waktu yang seluas-luasnya untuk beribadah sesuai dengan ajaran murni agama Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist. Seperti solat berjamaah di masjid untuk putra dan melakukan shalat Jumat pada waktunya. Lalu yang dimaksud hak kasih sayang orang tua adalah orang tua dapat menjenguk anaknya yang berada dipanti seminggu sekali dan untuk santrinya dapat menjenguk orang tuanya dua minggu sekali. Dengan demikian diharapkan bahwa hubungan silaturahmi dengan orang tua dapat terjaga.

Tidak lupa bahwa Muhammadiyah juga memberikan perhatiannya kepada penanggulangan bencana dengan membentuk Lembaga Resiliensi Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah atau dalam bahasa Inggris disebut *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)* yang didasari dari respon terhadap bencana gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006. Tugas pokok MDMC adalah menggerakan insan Muhammadiyah dalam upaya tanggap darurat, *recovery*, atau pemulihan, mitigasi atau kesiapsiagaan, maupun dalam upaya penguatan sistem jaringan organisasi pengelolaan sumber daya penanggulangan bencana⁴⁸. Makna kebencanaan yang dipahami oleh MDMC tidak hanya sebatas kejadian alam saja, namun bencana sosial seperti kemanusiaan juga merupakan tugas dari MDMC. MDMC juga bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam penanggulangan dan rehabilitasi pasca bencana. Diharapkan, kolaborasi ini memberikan respon cepat dan efektif terhadap bencana alam dan memperkuat solidaritas sosial di masyarakat⁴⁹.

Tokoh Klasik dan Kontemporer Muhammadiyah yang Konsisten Menegaskan Pentingnya Pembaruan Pemikiran Islam

a. Tokoh Klasik

K.H. Ahmad Dahlan, tokoh sekaligus pendiri organisasi Muhammadiyah membudayakan kader-kader Muhammadiyah untuk

⁴⁷ Prihati, Ibid, hlm.11

⁴⁸ Pangeran Bungsu, Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dan pemberdayaan umat dalam mewujudkan solidaritas, *journal of Da'wah*, vol.1 nomor 2, 2022, diakses 21 Juli 2025 <https://doi.org/10.32939/jd.v1i2.2465>

⁴⁹ Tanthowi, Opcit, hlm.182

dapat memahami teks dan konteks. Kontekstualisasi makna ayat-ayat Al-Qur'an tampak pada gerakan Muhammadiyah dalam memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, serta kesetaraan perempuan, K.H. Ahmad Dahlan bahkan menerima gelar pahlawan nasional pada 27 Desember 1061 melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 657 Tahun 1961⁵⁰.

H. Agus Salim, adalah seorang kader Muhammadiyah sekaligus seorang polyglot yang menjadi salah satu anggota BPUPKI dan panitia Sembilan. Sejak awal kemerdekaan, beliau aktif sebagai Menteri Luar Negeri. Beliau dikenal dengan sosok yang cerdas, kritis, dan mahir dalam berbicara bahasa asing. Kepandaiannya berdiplomasi dan kontribusi sebagai juru bicara Indonesia di dunia internasional menjadikan tokoh yang berpengaruh dalam pembentukan identitas bangsa. Beliau juga mendapatkan gelar pahlawan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 657 Tahun 1961⁵¹

Dokter Soetomo, merupakan sosok penggagas berdirinya organisasi modern pertama yang bernama Budi Utomo (Boedi oetomo). Pada 1952 hingga akhir hayatnya, beliau mengabdikan diri sebagai *Medisch Advisuer* atau penasehat urusan Kesehatan Muhammadiyah. Dan mendapatkan gelar pahlawan nasional pada tanggal 27 Desember 1961 melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 657 Tahun 1961.⁵²

H. Fachrodin, adalah seorang murid dari KH. Ahmad Dahlan yang berjasa dalam bidang literasi dan memimpin Redaksi Majalan Suara Muhammadiyah pertama. Beliau juga perintis Badan Penolong Haji Indonesia dan salah satu yang berperan dalam negosiasi untuk perlindungan jamaah haji dari Indonesia. Dan mendapatkan gelar

⁵⁰ Dinar Meidiana, "22 Kader Muhammadiyah Bergelar Pahlawan Nasional bagian 1", diakses 7 Januari 2026, https://umj.ac.id/edisi_fakultas/22-kader-muhammadiyah-bergelar-pahlawan-nasional-bagian-1/

⁵¹ Profil Tokoh, "Biografi Agus Salim dan Perannya untuk Indonesia", Kumparan.com, diakses 7 Januari 2026, <https://kumparan.com/profil-tokoh/biografi-agus-salim-dan-perannya-untuk-indonesia-23scABhTwpC/full>

⁵²Afandi, "dr. Soetomo, Pendiri Budi Utomo yang Bergabung dengan Muhammadiyah." Muhammadiyah.com, diakses 7 januari 2026, <https://muhammadiyah.or.id/2021/12/dr-soetomo-pendiri-budi-utomo-yang-bergabung-dengan-muhammadiyah/>

pahlawan nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1964⁵³.

b. Tokoh Kontemporer

Muhammad Amin Rais, Peran Amien di Muhammadiyah mencapai puncaknya ketika ia dipercaya menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1995–2000. Di bawah kepemimpinannya, Muhammadiyah tidak hanya memperkuat gerakan dakwah dan pendidikan, tetapi juga semakin menegaskan posisi sosial-politiknya dalam kehidupan berbangsa. Amien membawa semangat *amar ma'ruf nahi munkar* ke ranah publik, dengan menegaskan pentingnya etika, keadilan, dan demokrasi dalam pemerintahan. Di akhir masa kepemimpinannya, Amien menjadi figur penting dalam reformasi politik Indonesia. Pemikirannya tentang perlunya perubahan menuju pemerintahan yang bersih dan demokratis menjadi inspirasi gerakan reformasi 1998. Meski kemudian terjun ke dunia politik dengan mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN), hubungan ideologis dan moralnya dengan Muhammadiyah tetap kuat. Ia kerap menegaskan bahwa langkah politiknya berakar pada nilai-nilai Islam berkemajuan yang menjadi fondasi gerakan Muhammadiyah⁵⁴ Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, beliau lebih dikenal dengan nama Din Syamsudin. Kiprah di persyarikatan Muhammadiyah dimulai sejak tampil menjadi ketua umum sementara ikatan mahasiswa Muhammadiyah, ketua umum pemuda Muhammadiyah, dan wakil ketua Muhammadiyah. Uniknya beliau memiliki bekal pendidikan dasar dan menengah di Madrasah Ibtidaiyah Nahdathul Ulama (NU) dan Madrasah Tsawiyah Nahdathul Ulama (NU) Sumbawa Besar. Ketekunannya dalam menuntut ilmu mengantarkannya meraih gelar Magister dan Doktor pada bidang *Islamic Studies* di University of California, Los Angeles (UCLA) pada tahun 1996. Sepulangnya ke tanah air, ia aktif di dunia akademik sebagai dosen di berbagai perguruan tinggi seperti UMJ, UHAMKA, dan UI. Selain itu, Din juga sempat berkecimpung di dunia politik dan pemerintahan, antara lain sebagai Kepala Litbang Golkar, Anggota Dewan Riset Nasional, Dirjen

⁵³ Redaksi Muhammadiyah, “KH Abdur Rozak Fachrudin (Ketua 1968 – 1990).” Muhammadiyah.com, diakses 7 Januari 2026, <https://muhammadiyah.or.id/2021/03/kh-abdur-rozak-fachrudin-1971-1985/>

⁵⁴ Muhammadiyah, “Prof.Dr.H.Amien Rais (Ketua 1995-1998), diakses 7 Januari 2026, <http://arsip.muhammadiyah.or.id/id/content-167-det-prof-dr-h-amien-rais.html>

Binapenta Kementerian Tenaga Kerja, serta Sekretaris Umum MUI dan ICMI.

Ahmad Syafii Maarif, atau Buya Syafii Maarif, merupakan tokoh besar Muhammadiyah yang dikenal sebagai cendekiawan muslim berintegritas tinggi. Buya Syafii menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat dan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, kemudian melanjutkan ke Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Di sana, ia aktif dalam Hizbul Wathan dan menjadi pemimpin redaksi majalah *Sinar*. Setelah sempat mengajar di Lombok, ia menempuh pendidikan tinggi di Universitas Cokroaminoto, IKIP Yogyakarta, serta melanjutkan studi hingga ke Universitas Ohio dan Universitas Chicago, Amerika Serikat. Beliau juga sempat menjadi Presiden *World Conference on Religion for Peace* (WCRP). Usai masa kepemimpinannya, ia mendirikan Maarif Institute dan tetap aktif menyuarakan pandangan keislaman dan kebangsaan yang moderat, kritis, dan penuh kepedulian terhadap moralitas bangsa⁵⁵.

Haedar Nashir, adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang kembali terpilih untuk periode 2022–2027 dalam Muktamar ke-48 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebelumnya, ia juga memimpin Muhammadiyah pada periode 2015–2020, menggantikan Din Syamsuddin. Lahir di Bandung pada 25 Februari 1958, Haedar tumbuh dan berkarier di lingkungan Muhammadiyah sejak muda. Ia pernah menjabat Ketua I PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah (1983), Deputi Kader PP Pemuda Muhammadiyah (1985–1990), hingga menjadi Sekretaris Umum PP Muhammadiyah mendampingi Buya Syafii Maarif (2000–2005). Selain aktif berorganisasi, Haedar dikenal sebagai akademisi dan penulis produktif. Ia mengajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, dan menjadi pembimbing disertasi di Universitas Gadjah Mada. Pemikirannya banyak dituangkan dalam berbagai karya, di antaranya *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan, Memahami Ideologi*

⁵⁵ Tim Redaksi, Layanan kesehatan Muhammadiyah telah lahir jauh sebelum Indonesia merdeka, Muhammadiyah, diakses 7 Januari 2026, <https://muhammadiyah.or.id/2024/06/layanan-kesehatan-dari-muhammadiyah-telah-lahir-jauh-sebelum-indonesia-merdeka/>

Muhammadiyah, dan *Muhammadiyah Abad Kedua*, yang menggambarkan komitmennya terhadap pembaruan Islam dan kemajuan bangsa⁵⁶.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Muhammadiyah mengenai relasi agama dan negara berkembang secara dinamis dari gerakan purifikasi ke arah praksis sosial yang konstruktif dan berorientasi pada kemajuan masyarakat. Sejak KH. Ahmad Dahlan hingga kepemimpinan kontemporer, Muhammadiyah secara konsisten menegaskan bahwa negara tidak harus berwujud negara Islam secara formal, melainkan dapat menginternalisasikan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kemanusiaan, kejujuran, dan persamaan dalam sistem kenegaraan berbasis konsensus nasional. Dalam konteks Indonesia, Pancasila dipahami sebagai Darul Ahdi wa Syahadah, yakni ruang kesepakatan dan kesaksian untuk mewujudkan nilai-nilai Islam substantif dalam kehidupan berbangsa.

Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa moderasi Islam perspektif Muhammadiyah tidak berhenti pada tataran normatif-teologis, tetapi diwujudkan secara nyata melalui praksis institusional di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kemanusiaan, dan advokasi kebijakan publik. Melalui jaringan lembaga pendidikan, layanan kesehatan, gerakan filantropi, respons kebencanaan, serta penguatan demokrasi yang beretika, Muhammadiyah membangun model relasi agama dan negara yang bersifat kemitraan strategis dan non-dominatif. Dengan demikian, moderasi Islam berfungsi sebagai kerangka etis-operasional yang membimbing kontribusi Muhammadiyah bagi negara, sekaligus memperkaya diskursus pemikiran Islam kontemporer tentang hubungan agama dan negara dalam masyarakat majemuk.

⁵⁶ Redaksi Kabar Muhammadiyah, “profil Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir”, diakses 7 Januari 2026, <https://kabarmuhammadiyah.id/profil-ketua-umum-pp-muhammadiyah-haedarnashir/>

Referensi

Ahmad syafii, “membumikan islam”, IRCiSod, Yogyakarta, 2019, hlm.114

Aisyah Khoirunni'mah Al Mufarriju, “Sejarah dan peran Muhammadiyah untuk kemajuan Indonesia”, Jurnal Budi Pekerti Agama Islam, vo.2, (2024), <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i4.442>

Afandi, “dr. Soetomo, Pendiri Budi Utomo yang Bergabung dengan Muhammadiyah.” Muhammadiyah.com, diakses 7 januari 2026, <https://muhammadiyah.or.id/2021/12/dr-soetomo-pendiri-budi-utomo-yang-bergabung-dengan-muhammadiyah/>

Cecep suryana, “Kiprah politik dan sejarah organisasi Muhammadiyah Indonesia”, Jurnal Ilmu Dakwah Vol.4 No.14 , diakses 5 Juni 2025 <https://doi.org/10.15575/idalhs.v4i14.414>

Eliza F dkk, “Sejarah perumusan dan teks matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah” Jurnal Umsu Vol.5 No.1 diakses 11 Juni 2025 <https://doi.org/10.3059/insis.v0i1.18741>

Dinar Meidiana, “22 Kader Muhammadiyah Bergelar Pahlawan Nasional bagian 1”, (2024), diakses 7 Januari 2026, https://umj.ac.id/edisi_fakultas/22-kader-muhammadiyah-bergelar-pahlawan-nasional-bagian-1/

Goins Manoppo, Dua periode pimpin PP Muhammadiyah, (2022). diakses 4 Juni 2025 <https://sulut.kemenag.go.id/berita/508844/Dua-Periode-Pimpin-PP-Muhammadiyah- Haedar-Nashir-di-Mata-Kakanwil-Sarbin-Sehe>

Haedar Nashir, “Darul al-Ahdi wa al-Syahadah: Konsepsi Negara dalam Perspektif Islam Indonesia,” dalam Tafsir Sosial atas Islam, diakses 5 Juni 2025

<https://muhammadiyah.or.id/2023/08/darul-ahdi-wa-al-syahadah-negara-pancasila-perspektif-islam-berkemajuan/>

Hamsah, “Dasar Pemikiran Islam Berkemajuan Muhammadiyah 1912-1923”, Tesis, UIN Alauddin, Makassar (2016) <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1753/1/Hamzah%20F.pdf> (Dasar Pemikiran Islam Berkemajuan, n.d.)

Hidayat E, “Moderasi beragama dan Hak Asasi Manusia (HAM): Analisis Peran Agama dalam memperkuat Toleransi dan Kesetaraan”, Journal In Right, (2024), diakses 20 Juli 2025 <https://doi.org/10.14421/wkdjc729>

Ilham, “Moderasi beragama dalam perspektif Muhammadiyah”, (2021), diakses 20 Juli 2025, <https://muhammadiyah.or.id/2021/11/moderasi-beragama-dalam-perspektif-muhammadiyah/>

Ihram Republika, “di Usia 111, Muhammadiyah miliki 126 RS”, (2023), diakses 5 Juni 2025. <https://ihram.republika.co.id/berita/s4b0oy430/di-usia-111-tahun-muhammadiyah-miliki-126-rumah-sakit?>

Izzul Muslimin, Seratus tahun penolong kesengsaraan oemoem Muhammadiyah, (2023), diakses 21 Juli 2025 <https://muhammadiyah.or.id/2023/02/seratus-tahun-penolong-kesengsaraan-oemoem-muhammadiyah/>

Kusumawati, Perspektif Muhammadiyah Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah, Journal Sangaji Vol.3 No.2, 2019, diakses 20 Juli 2025 <https://doi.org/10.52266/sangaji.v3i2.472>

LPH-KHT PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH, VISI MISI MUHAMMADIYAH, (2014), diakses 3 Juni 2025 <https://www.lphkhtmuhammadiyah.or.id/visi-misi-tujuan-muhammadiyah/>

Mohammad Kosim, Moderasi Beragama, IAIN Madura, (2023), diakses 10 Juni 2025, <https://iainmadura.ac.id/berita/2023/12/moderasi-beragama>

Muhibb A, Keunggulan sistem pendidikan Muhammadiyah, (2024), diakses 21 Juli 2025 <https://uinjkt.ac.id/id/keunggulan-sistem-pendidikan-muhammadiyah>

Nurhayati dkk, “Muhammadiyah dalam perpektif sejarah, Organisasi, dan Sistem Nilai”, Yogyakarta: TrushMedia Publishing, (2018).

Pangeran Bungsu, Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dan pemberdayaan umat dalam mewujudkan solidaritas, journal of Da'wah, vol.1 nomor 2, (2022), diakses 21 Juli 2025 <https://doi.org/10.32939/jd.v1i2.2465>

Pani Dias, “Islam berkemajuan berspektif haedar nashir”, jurnal Edupedia Publisher vol.3 no.3 (2024), diakses 3 Juni 2025 <https://doi.org/10.56855/jpr.v3i3.1072>

Pasal 4 ayat (1) AD ART Muhammadiyah, (2023). diakses 11 Juni 2025 <https://www5.w.jembermu.com/p/anggaran-dasar-dan-anggaran-rumah.html>

Prihati dkk, Peran panti asuhan Muhammadiyah dalam pemenuhan hak-hak anak dalam rangka perlindungan anak di DIY, Jurnal Transparansi Hukum, diakses 21 Juli 2025, <https://doi.org/10.30737/transparansi.v0i0.3670>

Profil Tokoh, “Biografi Agus Salim dan Perannya untuk Indonesia”, Kumparan.com, diakses 7 Januari 2026, <https://kumparan.com/profil-tokoh/biografi-agus-salim-dan-perannya-untuk-indonesia-23scABhTwpC/full>

Redaksi Muhammadiyah, “KH Abdur Rozak Fachrudin (Ketua 1968 – 1990).” Muhammadiyah.com, diakses 7 Januari 2026, <https://muhammadiyah.or.id/2021/03/kh-abdur-rozak-fachrudin-1971-1985/>

Redaksi Kabar Muhammadiyah, “profil Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir”, diakses 7 Januari 2026, <https://kabarmuhammadiyah.id/profil-ketua-umum-pp-muhammadiyah-haedar-nashir/>

Sodikin A, M.Anas Ma’arif, “Penerapan Nilai Islam Moderat Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi”, (2019), *Jurnal Penelitian pendidikan Agama Dan Keagamaan* (EDUKASI),
<https://doi.org/10.32729/edukasi.v19i2.702>

St Nurhayati dkk, “Muhammadiyah: Konsep wajah islam Indonesia”, Suara Muhammadiyah, Pare-pare, 2019, hlm.33.

Suara Muhammadiyah, 101 Tahun suara Muhammadiyah, (2016), diakses 4 Juni 2025
<https://web.suaramuhammadiyah.id/2016/10/26/101-tahun-suara-muhammadiyah-harapan-baru-islam-berkemajuan/>

Sugeng Aji Prasetyo dkk, “Kontribusi Muhammadiyah dalam penguatan demokrasi dan stabilitas Pemerintahan di Indonesia”, jurnal Masterpiece, vol.2,No.4, (2024), diakses 5 Juni 2025 <https://doi.org/10.62083/zhy67s73>

Syamsul arifin, “Rekonstruksi Al Islam Kemuhammadiyahan (AIK) perguruan tinggi Muhammadiyah sebagai praksis pendidikan nilai”, Jurnal UMM, vol.13, (2015)
<https://doi.org/10.32729/edukasi.v13i2.239>

Tanthowi P, “Muhammadiyah dan Politik: Landasan Ideologi Bagi Artikulasi Konstruktif”, Jurnal Maarif, (2019), hlm.178. diakses 5 Juni 2025 <https://doi.org/10.47651/mrf.v14i2.65>

Tim Pusat Akreditasi Universitas Ahmad Dahlan, (2023), diakses 3 Juni 2025 <https://uad.ac.id/akreditasi-universitas/>

Tim Pusat Akreditasi, UMY, (2022) diakses 3 Juni 2025
<https://vokasi.umy.ac.id/wp-content/uploads/2023/06/Sertifikat-Akreditasi-UMY-2022-2027.pdf>

Tim Redaksi, Layanan kesehatan Muhammadiyah telah lahir jauh sebelum Indonesia merdeka, Muhammadiyah, diakses 7 januari 2026, <https://muhammadiyah.or.id/2024/06/layanan-kesehatan-dari-muhammadiyah-telah-lahir-jauh-sebelum-indonesia-merdeka/>

Warsito dkk, “Peran Muhammadiyah dalam moderasi beragama di Indonesia: sebagai pelopor dan penjaga kerukunan bergama”, Journal Masterpiece vol.2, (2024), diakses 20 Juli 2025 <https://doi.org/10.62083/0apwf271>

Wikipedia, Daftar Rumah Sakit Muhammadiyah, (2023) diakses 5 Juni 2025.

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_rumah_sakit_Muhammadiyah

Zuly Qadir, “Muhammadiyah memperkuat moderasi islam memutus radikalisme”, Journal of Maarif Institute, (2009), diakses 3 Juni 2025, <https://doi.org/10.47651/mrf.v14i2.58>